

**Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Melalui  
Skema Penyusunan Dokumen RPJMDesa  
(Studi di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Rizki Hadi Maulana**

**1510511027**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH JEMBER TAHUN 2020**

**Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Melalui  
Skema Dokumen Penyusunan RPJMDesa  
(Studi di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)**

Oleh

Rizki Hadi Maulana

NIM. 1510511027

Dosen Pembimbing : Drs. Itok Wicaksono, M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH JEMBER TAHUN 2020**

## ABSTRAK

Proses pembangunan desa di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember masih memiliki permasalahan yang kompleks, meskipun Kepala Desa sudah berbuat yang terbaik dalam menjalankan tugasnya, tetap saja informasi yang didapat dari pelaksanaan pembangunan melalui dokumen RPJMDesa belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Padahal dalam pelaksanaannya Kepala Desa sudah melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, BPD, Kelompok Tani dan lain sebagainya untuk ikut serta dalam merencanakan proses pembangunan kemajuan desa. Akan tetapi, tetap saja masyarakat tidak bisa mengakses informasi yang dibutuhkan melalui aparat desa. Ditambah lagi komunikasi antara aparat desa tidak harmonis, yang menjadikan setiap pelayanan pembangunan di desa Sumber Ketempa semakin lambat dan terhambat. Masalah tersebut menjadi indikator peran dari perangkat desa dalam mengembangkan prinsip transparansi pada pemerintahan desa SumberKetempa.



## **Pendahuluan**

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam satuan Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dipisahkan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintah Desa diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah. Diaturinya desa dengan undang-undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi undang-undang tersebut, dimana Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera Daerah (Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah,2015).

Pemerintah desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa yang membantunya untuk mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa diharapkan harus mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini memberikan wacana dan paradigma baru dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip keterbukaan.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di sub bab sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah : Bagaimanakah proses kepemimpinan Kepala Desa Sumber Ketempa dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan melalui skema penyusunan dokumen RPJMDesa?

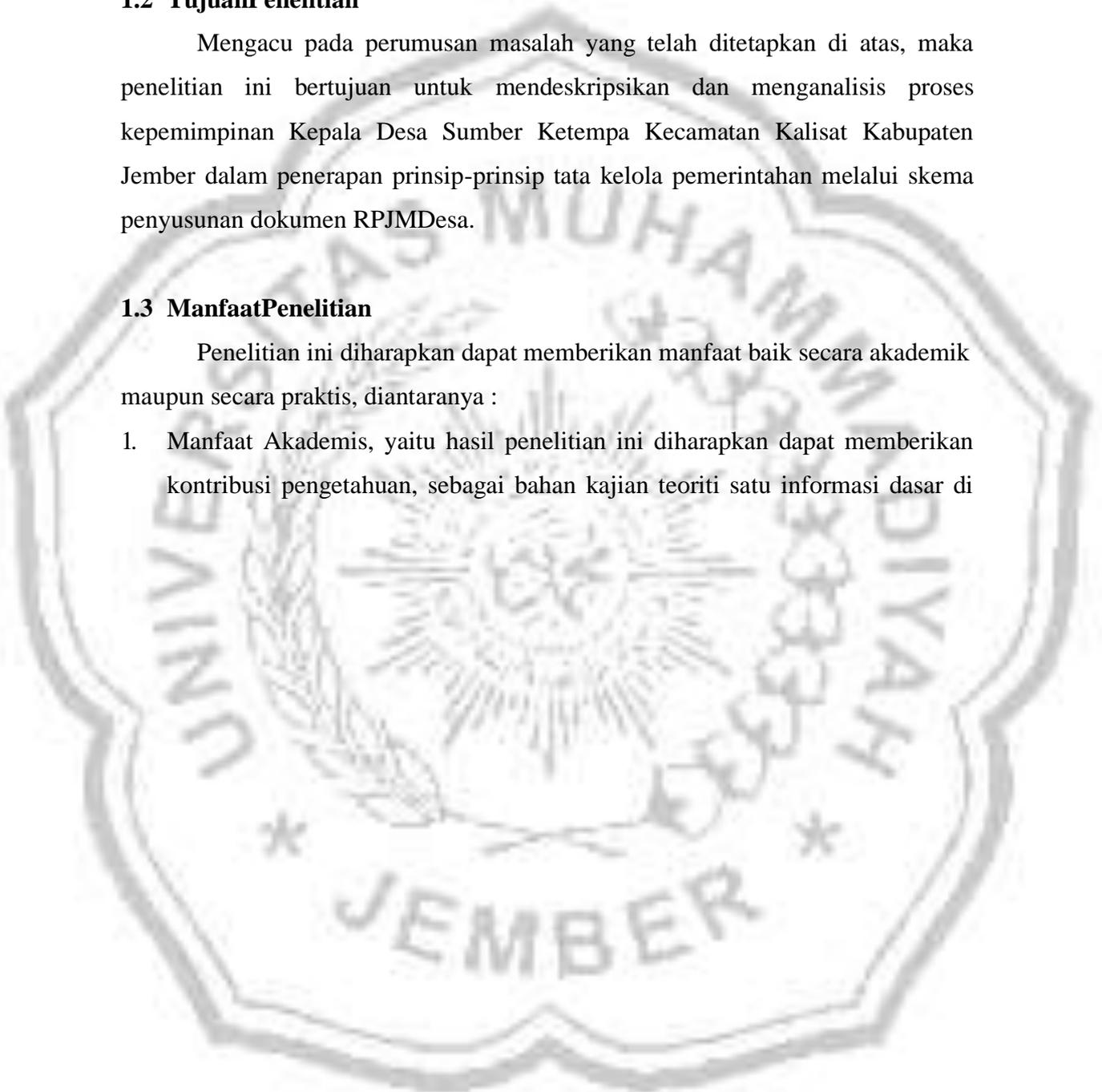
### **1.2 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses kepemimpinan Kepala Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan melalui skema penyusunan dokumen RPJMDesa.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis, diantaranya :

1. Manfaat Akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, sebagai bahan kajian teoriti satu informasi dasar di



## **Metode Penelitian**

Teori merupakan pernyataan yang bersifat universal, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pembahasan dan analisis. Teori sangat beragam dan memiliki makna yang luas. Beberapa teori yang dipilih ialah teori yang memiliki relevansi dengan penelitian. Pada penulisan karya ilmiah ini penulis memakai beberapa teori diantaranya Kepemimpinan, Pemerintahan Desa, Tata Kelola Pemerintahan, Konsep Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Terdahulu yang dapat menjadi pandangan dalam penulisan.

Tinjauan Pustaka tersebut bisa bertambah maupun berkurang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Teori-teori yang dipakai nantinya akan dijabarkan relevansi dan keterkaitannya. Penulis akan menjelaskan relevansi pada tiap sub bab dan pada akhir tiap sub bab. Setiap peneliti memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda dalam menyajikan bentuk-bentuk penelitian, tetapi harus tetap mengikuti kaidah yang berlaku.

### **1.1 Tinjauan Kepemimpinan**

#### **1.1.1 Pengertian Kepemimpinan**

Pengertian kepemimpinan menurut Tannebaum (2012:2) adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Salusu, (2006:112) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Herujito (2005:67) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah seni kemampuan mempengaruhi perilaku manusia dan kemampuan untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pimpinan.

kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar mereka suka berusaha mencapai tujuan kelompok, dan seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuan membimbing orang.

#### **1.1.2 Gaya Kepemimpinan**

Manajemen sumber daya manusia merupakan kajian ilmu pengetahuan yang membahas mengenai keadaan iklim organisasi baik secara internal maupun secara eksternal. Gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang sangat penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Herujito (2005:72) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah

(*leadership styles*) merupakan cara yang diambil seseorang dalam rangka mempraktekkan kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan bukan suatu bakat, sehingga dapat dipelajari dan dipraktekkan dan dalam penerapannya harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

Pakar kepemimpinan menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan perilaku pimpinan terhadap pengikutnya, atau cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya (Trimo 2005:69). Pemimpin adalah orang yang memimpin suatu kelompok (dua orang atau lebih), baik pada suatu organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara konseptual Siagian (2011:131) menyatakan mengenai adanya tiga penekanan gaya kepemimpinan dalam mengelola suatu organisasi, yaitu :

- a. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situasional dalam menerapkan berbagai macam gaya kepemimpinan seperti gaya otokratik, paternalistik, laissez faire, demokratik dan karismatik
- b. Gaya kepemimpinan yang tepat ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau kematangan para anggota organisasi
- c. Peranan apa yang diharapkan dapat dimainkan oleh para pemimpin dalam organisasi.

Adapun pembagian gaya kepemimpinan menurut Siagian (2011:157-161) yaitu :

a. Gaya kepemimpinanotokratis

Gaya ini kadang-kadang dikatakan kepemimpinan yang terpusat pada diri pemimpin atau gaya direktif. Gaya ini ditandai dengan sangat banyaknya petunjuk yang datangnya dari pimpinan dan sangat terbatasnya bahkan sama sekali tidak adanya peran serta anak buah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

b. Gaya kepemimpinanbirokratis

Gaya ini dapat dilukiskan dengan kalimat “Memimpin berdasarkan peraturan”. Perilaku pemimpin ditandai dengan keketatan pelaksanaan prosedur yang berlaku bagi pemimpin dan anak buahnya, sebenarnya gaya ini merupakan bentuk lain dari gaya otokratis.

c. Gaya kepemimpinandemokratis

Gaya ini kadang-kadang disebut juga gaya kepemimpinan yang terpusat pada anak buah. Kepemimpinan konsultatif atau partisipatif. Dalam gaya ini terjadi komunikasi dua arah.

d. Gaya kepemimpinanbebas

Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin sedikit sekali menggunakan kekuasaannya atau sama sekali membiarkan anak buahnya untuk berbuat sesuka hatinya. Gaya kepemimpinan bebas boleh dikatakan tiada kepemimpinan.

Gaya kepemimpinan merupakan upaya mempengaruhi orang-orang untuk ikut dalam pencapaian tujuan bersama. Gaya kepemimpinan juga merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap sekelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan secara efektif pula, untuk itu pemimpin harus betul-betul dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin dengan cara menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik bawahan.

### 1.1.3 Ciri-Ciri Pemimpin Ideal dan Nilai Kepemimpinan

Menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Siagian (2011:34) adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan umum yang luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, obyektivitas, pragmatisme, fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masadepan.
- b. Sifat inkuisitif, rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi, keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, kesediaan menjadi pendengar yang baik.
- c. Kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan skala prioritas, membedakan yang urgen dan yang penting, keterampilan mendidik, dan berkomunikasi secara efektif.
- d. Kecerdasan, artinya pemimpin harus memiliki kecerdasan lebih dari pengikutnya, tetapi tidak terlalu banyak melebihi kecerdasan pengikutnya.
- e. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, sehingga pemimpin akan selalu energik dan menjadi teladan dalam memimpin pengikutnya.
- f. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan, dalam arti bahwa pemimpin harus menghargai dan memperhatikan keadaan pengikutnya.

## Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Gambaran Umum Desa

#### 4.1.1 Legenda Dan Sejarah Desa

##### a. Legenda Sejarah Desa Sumberketempa

Asal usul Desa Sumber ketempa menurut cerita orang-orang terdahulu dengan dasar dari cerita para sesepuh Desa Sumber ketempa menceritakan hal-hal sebagai berikut :

Sejarah mengatakan bahwa Desa Kami asal mulanya adalah hutan lebat tidak jauh perbedaannya dengan hutan yang ada di daerah pegunungan gunitir Silo, Para tokoh sesepuh desa mengatakan sebelum desa ini terbentuk dan Indonesia pun belum Merdeka, Desa ini berpenduduk ± 22 orang yang telah membabat hutan lebat menjadi desa yang indah dan di beri nama Sumber ketempa. Adapun nama sesepuh atau orang pertama yang menghuni desa ini adalah :

Mbah Buyut Marlina Mbah

Buyut Dhirun Mbah Buyut

Rohan Mbah Buyut Sabih

Keempat orang tersebut diatas pada saat menjadi pimpinan disebut dengan julukan Petinggi Desa yang sekarang dirubah menjadi Kepala Desa. Adapun orang pertama yang menjadi Petinggi Desa Sumber Ketempa, yaitu : Mbah Buyut Marlina. Para sesepuh Desa menceritakan sejarah desa, pada zaman dahulu desa ini banyak sumber mata air yang mana setiap mata air ada hewan Bulus yang dinamakan Ketempa sehingga hasil kesepakatan keempat tokoh ini mengambil kesimpulan desa ini diberi nama *SUMBERKETEMPA*.

##### b. Gambaran Umum Demografi

Desa Sumber ketempa terletak di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember memiliki luas administrasi 8590 Ha, terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Pancuran, Dusun Gudang weringin, Dusun Kulon dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : DesaSebanen
- b. Sebelah Timur : Desa KarangPaiton
- c. Sebelah Selatan : DesaAjung
- d. Sebelah Barat : Desa KalisatUtara

### 4.2 Kepemimpinan Kepala Desa SumberKetempa

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada sebuah desa, peran kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh. Terkait peran dan tanggungjawab kepala desa tersebut, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa, selain yang diperlukan

di dalam undang-undang, juga diperlukan kemampuan "leadership" dalam menjalankan tugas yang diembannya. Kepemimpinan (*leadership*), secara umum merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut mengikuti apa yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut wawancara dengan beberapa *key informan* pada masyarakat dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, tugas dan kewajiban kepala desa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah dilakukan dengan baik, kan tetapi demi terciptanya *good governance* yang sempurna, jalinan



interaksi dengan masyarakat yang harus lebih diterapkan. Kedekatan hubungan antara kepala desa sebagai pimpinan desa dengan masyarakat desa, dapat mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman kepala desa terhadap kebutuhan masyarakat desa Sumber Ketempa serta kebutuhan desa Sumber Ketempa. Interaksi dan komunikasi antara kepala desa dan masyarakat desa, akan memberikan rasa persahabatan dan kekeluargaan yang hangat serta masyarakat akan merasa sangat diperhatikan oleh pemerintahan desa.

#### **4.2.1 Kepemimpinan Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka (*Transparency*)**

Pemerintahan yang terbuka (*transparency*) adalah tujuan dari seluruh warga desa, dimana supaya pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah dapat dikontrol oleh masyarakat, dan dapat diketahui oleh seluruh warga masyarakat sejauh mana kinerja aparatur pemerintahan desa. Demokrasi adalah salah satu factor yang mendukung adanya keterbukaan (*transparency*) terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh suatu desa, agar tercipta kesejahteraan, dan tujuan bersama antara warga masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), juga merupakan salah

satu konsep-konsep untuk menunjang agar terciptanya pemerintahan yang baik di dalam desa, maka dengan demikian peran kepala desa menjadi faktor utama agar mendukung terciptanya pemerintahan yang baik di dalam desa. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian terhadap peran kepemimpinan kepala desa, bagaimana perannya dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, terbuka (*transparency*).

#### **4.2.2 Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan partisipasi (*participation*) masyarakat.**

Partisipasi (*participation*) adalah salah satu unsur untuk menunjang pembangunan di dalam pemerintahan, baik pembangunan secara ekonomi, politik, dan sosial. Partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) agar tercipta kesetaraan antara masyarakat dan aparatur pemerintahan desa. Partisipasi juga memiliki peran besar dalam mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat dan demokrasi di desa, karena dengan adanya partisipasi masyarakat, desa akan lebih cepat maju, baik dari segi ekonomi, sosial dan politik.

Peran kepala desa sangat strategis sebagai pendongkrak utama dalam meningkatkan partisipasi warga desa yang dipimpinnya. Terkait peningkatan partisipasi (*participation*) masyarakat desa maupun aparatur pemerintahan desa, pendekatan personal yang dilakukan oleh kepala desa Sumber Ketempa memiliki dampak yang besar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di desa Sumber Ketempa. Terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yakni, membuat rapat yang terbuka atau diskusi yang terbuka antara masyarakat dan aparatur desa, dimana masyarakat diberi kebebasan berbicara untuk menyalurkan aspirasinya dan masukan-masukan kedalam forum diskusi tersebut, untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan bersama-sama.

#### **4.2.3 Kepemimpinan Kepala Desa melalui pendekatan Konsensus/Musyawaharah**

##### **4.2.3.1 Diskusi Umum/Musyawaharah**

Musyawaharah desa adalah hal yang senantiasa dilakukan di desa Sumber Ketempa. Kepala desa sangat membutuhkan partisipasi masyarakat desa, dalam hal penyusunan program kerja dan pelaksanaan program kerja tersebut.

#### **4.2.3.2 Secara AzasKekeluargaan**

Azas kekeluargaan adalah salah satu cara pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat desa, baik terhadap aparaturn pemerintahan maupun kepada tokoh- tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Sehingga seluruh elemen masyarakat desa Sumber Ketempa memiliki ikatan kekeluargaan yang erat dan mempunyai satu tujuan yang sama untuk mencapai kepentingan bersama, yaitu menjalankan pemerintahan yang baik, terbuka dan demokratis. Setiap masyarakat memiliki peran dalam menjalankan pemerintahan.

#### **4.2.4 Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menciptakan Persamaan Hak WargaDesa**

Kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin dan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertindak sebagai eksekutif dalam pemerintahan desa untuk dapat menjalankan roda pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga legislatif pengawas jalannya pemerintahan desa.



## **Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Menurut peneliti kepemimpinan adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan kearah yang lebih baik. Pemimpin yang dimaksud disini adalah kepala desa. Sebagai pemimpin pada suatu desa, kepala desa harus mampu menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Untuk proses membangun desa dan menjalankan pemerintahan desa yang demokratis, terbuka dan adil melalui dokumen perencanaan RPJMDesa, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aktor yang terpenting. Kepemimpinan merupakan faktor utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance pada suatu desa melalui beberapa jenis program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

Pendekatan secara kekeluargaan juga merupakan salah satu faktor sebagai pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. Hal ini terlihat dari setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa yang senantiasa dilakukan melalui azas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepala Desa Sumber Ketempa dalam menjalankan pemerintahannya terkendala oleh kurang harmonisnya hubungan antar aparatur desanya (bawahannya) sehingga pelayanan dan program kegiatan yang telah dilaksanakan tidak diinformasikan langsung kepada masyarakat desayang

pada akhirnya masyarakat menilai tata kelola pemerintahan desa masih belum maksimal.

2. Kepala Desa Sumber Ketempa sudah sangat komunikatif dengan masyarakat desa untuk menyerap aspirasi masyarakat demi pembangunan desa melalui dokumen RPJM Desa.
3. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Kepala Desa Sumber Ketempa sudah berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa, baik itu melalui diskusi atau musyawarah dan pendekatan lain yang dilakukan di kepala desa. Akan tetapi output dari konsep diskusi tersebut terhalang oleh sikap para aparaturdesanya.
4. Dalam merumuskan suatu kebijakan di dokumen RPJM Desa, kepala desa Sumber Ketempa selalu mengutamakan musyawarah atau diskusi umum dengan masyarakat desa untuk menerapkan persetujuan agar dapat diimplementasikan bersama.
5. Untuk menciptakan kesejajaran dan pemerintahan yang baik, kepala desa mempunyai hak dan kewenangan untuk mendelegasikan program kerja kepada tokoh-tokoh masyarakat desa dan pihak swasta agar dapat berjalan secara merata.

## **5.2 Saran**

Dalam penelitian mengenai kepemimpinan Kepala Desa Sumber Ketempa yang dilakukan oleh penulis maka penulis memberikan kebebasan saran, diantaranya yaitu :

1. Dalam mewujudkan good governance dalam hal pembangunan desa, pemerintahan desa harus saling terbuka (transparan), termasuk sikap dari aparatur desa harus harmonis dan mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam setiap pembangunan desa, dan melakukan koordinasi yang menyeluruh agar kepentingan dan aspirasi masyarakat desa dapat mewujudkan pembangunan desa.
2. Dalam menjalankan sebuah kebijakan pembangunan di desa, aparatur desa harus benar-benar terlibat secara aktif dalam melakukan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai kebijakan yang akan diambil, agar masyarakat dapat aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi di tingkatdesa.

3. Kepala desa harus tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa seperti nilai-nilai kekeluargaan sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan desa apalagi tentang pembangunan desa tidak terjadi lagi pelanggaran yang dapat mengganggu nilai demokrasi di tingkat desa, sehingga perencanaan yang telah dibuat melalui RPJMDes dan RKPDesa dapat terlaksana dengan baik.
4. Kepala Desa Sumber Ketempa diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan lagi kualitas aparatur (SDM) dan program pembangunan lainnya yang tertuang di RPJMDes, agar suatu saat desa ini menjadi desa prestasi dan menjadi contoh dalam menjalankan pemerintahan yang baik melalui skema perencanaanpembangunan.
5. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, kepala desa harus benar-benar mengutamakan pelayanan yang baik, akuntabel, demokratis, dan mempunyai visi dan misi yang sejalan antara aparatur pemerintahan desa dan warga masyarakatnya.
6. Sebelum menjalankan suatu kebijakan harus lebih dulu mengkaji lebih dalam apakah kebijakan tersebut dapat berjalan dengan sumber daya manusianya, dan apakah bertujuan untuk kepentingan masyarakatdesa.
7. Diharapkan Kepala Desa dapat mempertahankan gaya kepemimpinan pemerintahan secara demokratis ini dan dapat menyelesaikan masaah yang ada dalam tubuh internal pemerintahdesa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah Rosfa Nur, 2017. *Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara), Lampung: Skripsi UIN Raden Intan.
- Adisasmita Rahardjo, 2013. *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gibson, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Bahasa Indonesia)*. Jakarta: PT Prenhalindo.
- Gunawan, Betara Indra. 2013. "Mengenal Perangkat Desa". <http://www.betaraubd.com/2013/03/mengenal-perangkat-des.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2020 pukul 10.00WIB.
- Hidayat, Komaruddin, Azra, Azyumardi, 2008. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, Jakarta: Prenada MediaGroup.
- Hariadi, Pramono, et.al, 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Hal 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Herujito, Y.M, 2005. *Leadership*. Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jayadinata dkk, 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB.
- Karim, Abdul Gaffar, 2006. *Kompleksitas, Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Labolo, Muhadam. 2014. "Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" Hal 8, Malang: Intrans Pubising.
- Mosley, 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miftah Thoha, 2010. *Kepemimpinan dan Manajemen, Edisi Buku Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pristiyanto D, 2015. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta Selatan. Yayasan Penabulu.
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Revisi*, Hal 1, Bandung: Fokusmedia.
- Salusu, J, 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo: Jakarta.
- Siagian, Sondang, 2011. *Sistem Manajemen Kerja*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sedarmayanti, 2011. *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk Meraih Keberhasilan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syokrani, Syahriani, 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik; Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*, Bandung: RefirikaAditama.
- Santosa, Pandji, 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. RefirikaAditama.
- Supriatna, Tjahya, 1993. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sobandi, Khairu Roojiqien, Bawono, Icuk Rangga, 2003. *Mewujudkan Good Governance Pada Tingkat Desa Melalui Transparansi Dan Akuntabilitas*, Artikel, Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto.

Sakapurnama, Eko, dkk. 2012. *Membuka Informasi Menuju Good Governance*.

Jakarta: UI-Press.

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:

Alfabeta. Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*.

Bandung: Alfabeta. Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan*

*Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tannebaum, 2012. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*,

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Terry, GR, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*.

Jakarta: PT. Indeks.

Thoha, Miftah, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tutik, Titik Triwulan, 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*,

Jakarta: Prestasi Pustaka.

Trimo, 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Rajawali Pers: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Otonomi Daerah).